Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 3, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

PELAKSANAAN FUNGSI BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI DALAM MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERANG

Mareny Viviana Silaen[1]

[1]Progaram Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang Kampus Kota Serang, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available Juli 2026

marenyviviana@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Magang adalah metode pembelajaran berbasis praktik yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai lingkungan profesional, terutama di sektor administrasi pemerintahan. Laporan ini membahas pelaksanaan magang yang dilakukan di Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Serang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami pelaksanaan fungsi organisasi, pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan, serta penerapan yang dilakukan dalam magang ini, meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian dengan melakukan observasi langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan administratif. Selama magang, penulis terlibat dalam berbagai aktivitas seperti pengelolaan data dan informasi jabatan, pengarsipan dokumen, penyusunan data terkait organisasi perangkat daerah (OPD), dan tugas administrastif lainnya. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi telah berjalan secara sistematis dan mendukung prinsip *good governance*, terutama dalam aspek akuntabilitas, efektivitas, dan ketertiban administrasi. Secara keseluruhan, kegiatan magang ini memberikan manfaat serta sikap profesional kepada penulis dalam menghadapi dunia kerja, khususnya di lingkungan pemerintahan.

Kata Kunci: Sekretariat Daerah Kabupaten Serang; Administrasi Pemerintahan; Magang; Tata Kelola Pemerintahan; Pengelolaan Dokumen.

A B S T R A C T

An internship is a practice-based learning method designed to enhance students' understanding of the professional environment, particularly in the government administration sector. This report discusses the implementation of an internship conducted at the Organization and Bureaucratic Reform Division of the Serang Regency Regional Secretariat. The objective of this activity was to understand the implementation of organizational functions, institutional management, administrative procedures, and the application of bureaucratic reform in support of good governance. The process undertaken during this internship included the preparation, implementation, and evaluation stages, involving direct observation and active participation in administrative activities. During the internship, the author was involved in various activities such as managing position information data, filing documents, compiling data related to regional government agencies (OPDs), and other administrative tasks. The results indicate that the functions of the Organization and Bureaucratic Reform Division have been carried out systematically and support the principles of good governance, particularly in terms of accountability, effectiveness, and administrative order. Overall, this internship provided the

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

author with valuable experience and fostered a professional attitude in preparing for the workforce, particularly within the government sector.
***Keywords**: Serang Regency Regional Secretariat; Government Administration; Internship; Governance; Document Management.*

1. PENDAHULUAN

Di era reformasi, tuntutan terhadap perubahan dalam sistem pemerintahan semakin meningkat. Kondisi tersebut mendorong penerapan *good governance* sebagai pendekatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Rahmadana et al., 2020). Dalam konteks ini, administrasi pemerintahan berperan penting dalam mengelola kebijakan, sumber daya, serta program pembangunan melalui proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang berkesinambungan (Mardiasmo, 2020 dalam Rozikin, 2024).

Salah satu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas organisasi pemerintah, termasuk melalui penyederhanaan struktur organisasi dan penguatan jabatan fungsional agar birokrasi lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat (Sri et al., 2024). Keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada pelaksanaan fungsi organisasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan sistem administrasi yang tertata.

Pada tingkat pemerintahan daerah, pelaksaan reformasi birokrasi menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah, termasuk sekretariat Dearah Kabupaten Serang. Salah satu bagian yang berperan strategis adalah Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang memiliki tugas dalam penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Peran tersebut berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *good governance* (Rahmatan et al., 2023).

Dalam mendukung pembangunan kompetensi sumber daya manusia di bidang administrasi publik, perguruan tinggi menyelenggarakan program magang sebagai sarana pembelajaran berbasis praktik. Melalui kegiatan magang, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung mengenai administrasi pemerintahan, penerapan kebijakan, serta budaya kerja organisasi. Pengalaman tersebut menjadi media untuk mengintegrasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh di perkuliahan dengan praktik nyata di instansi pemerintah (Putri et al., 2024). Pelaksanaan magang di Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Serang memberikan kesempatan bagi penulis untuk terlibat dalam berbagai kegiatan administrasi, seperti pengelolaan dokumen, pengumpulan dan pengolahan data, serta kegiatan pendukung reformasi birokrasi. Keterlibatan tersebut memberikan pemahaman mengenai penerapan administrasi pemerintahan dalam mendukung efektivitas organisasi sekaligus mengembangkan kompetensi profesional melalui penerapan disiplin, ketelitian, tanggung jawab, dan kerja sama tim.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan magang di Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Serang serta menganalisis keterkaitannya dengan penerapan administrasi pemerintahan dan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep *Good Governace* dalam Administrasi Pemerintahan

Konsep *Good Governance* merupakan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

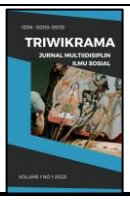

responsivitas dalam pelayanan publik. Menurut (Rahmadana et al., 2020), penerapan *good governance* bertujuan menciptakan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sejalan dengan itu *United Nations Development Program (UNDP)*, menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dibangun melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan (Sihotang, 2023).

2.2 Reformasi Birokrasi dan Fungsi Bagian Organisasi

Reformasi birokrasi merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penyempurnaan kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, serta sistem akuntabilitas kinerja. Menurut (Sri et al., 2024) Reformasi birokrasi bertujuan mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, bersih, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu bentuk reformasi birokrasi di Indonesia adalah kebijakan penyederhanaan struktur birokrasi yang mengakibatkan sebagian jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional (Gumay et al., 2019).

Pada tingkat pemerintah daerah, Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi memiliki peran strategis dalam melaksanakan penataan kelembagaan, penyusunan tata laksana, analisis jabatan *(job analysis),* analisis beban kerja (*workload analysis),* serta monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi. Pelaksanaan fungsi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan daerah.

2.3 Administrasi Pemerintahan dan Manajemen Organisasi Publik

Administrasi pemerintahan merupakan proses pengelolaan sumber daya publik melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pembangunan. Menurut Mardiasmo (2020), keberhasilan administrasi pemerintahan ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan, anggaran, serta akuntabilitas kinerja secara efektif (Rozikin, 2024). Dalam perspektif manajemen organisasi, Henri Fayol mengemukakan lima fungsi manajemen, yaitu *planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling*. Kelima fungsi tersebut masih relevan dalam organisasi sektor publik karena menjadi dasar dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan modern. Perencanaan diperlukan untuk menentukan arah organisasi, pengorganisasian mengatur pembagian tugas, pengarahan memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai tujuan, koordinasi menyelaraskan aktivitas antarunit, sedangkan pengawasan bertujuan mengevaluasi pencapaian kinerja organisasi (Hasan et al., 2025).

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa reformasi birokrasi berpengaruh terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. (Gumay et al., 2019) Mengkaji implikasi kebijakan penyederhanaan birokrasi terhadap penataan jabatan aparatur sipil negara dan menemukan bahwa transformasi jabatan struktural menjadi jabatan fungsional mampu meningkatkan fleksibilitas organisasi, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala kelembagaan.

*Corresponding author
E-mail addresses: marenyviviana@gmail.com

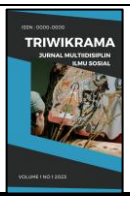

(Sri et al., 2024) Menjelaskan bahwa reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, profesional, dan akuntabel melalui perbaikan sistem kerja, tata kelola organisasi, serta kualitas pelayanan publik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi sangat dipengaruhi oleh komitmen organisasi dan kapasitas aparatur dalam menjalankan perubahan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, sebagian besar masih berfokus pada aspek kebijakan dan perubahan struktur organisasi. Penelitian mengenai pelaksanaan fungsi Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi dalam mendukung administrasi pemerintahan daerah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan fungsi tersebut di sekretariat Daerah Kabupaten Srang sebagai upaya mendukung penerapan *good governance*.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang deskriptif untuk memahami pelaksanaan fungsi Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Serang dalam mendukung administrasi pemerintahan daerah. Menurut Basrowi dan Suwandi (2008), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami suatu fenomena berdasarkan kondisi nyata di lapangan melalui keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena mampu mendeskripsikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi berdasarkan fakta yang ditemukan selama kegiatan magang.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung selama pelaksanaan magang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa surat masuk, surat keluar, nota dinas, Surat Perintah Tugas (SPT), serta berbagai literatur yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan reformasi birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi, dokumentasi, dan studi pustaka sehingga diperokeh data yang kredibel (Fadli, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan magang, Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Serang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah melalui penataan kelembagaan, penyusunan sistem kerja, pengelolaan administrasi organisasi, serta pelaksanaan reformasi birokrasi. Unit kerja ini berfungsi sebagai pendukung administrasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas organisasi melalui pengelolaan dokumen, penyediaan data organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, serta monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi. Seluruh aktivitas tersebut menunjukkan bahwa administrasi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan ketatausahaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi di Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Henri Fayol. Fungsi perencanaan diwujudkan melalui penyusunan program kerja, analisis kebutuhan organisasi, serta penyusunan sistem kerja sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi. Fungsi

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

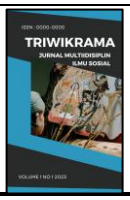

pengorganisasian terlihat dari pembagian tugas yang jelas sesuai dengan bidang kerja masing-masing pegawai, sehingga proses administrasi dapat berjalan secara efektif.

Fungsi pengarahan dan koordinasi juga telah diterapkan melalui pemberian arahan oleh pimpinan, pembagian tanggung jawab yang jelas, komunikasi antarpegawai, serta pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala. (Gumay et al., 2019) Menyatakan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya dipengaruhi oleh penyederhanaan struktur organisasi, tetapi juga oleh penguatan sistem kerja, koordinasi, dan pembagian tugas yang jelas dalam organisasi pemerintah.

Pelaksanaan fungsi pengawasan menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas administrasi. Berdasarkan hasil observasi, pengawasan dilakukan melalui pemantauan hasil pekerjaan, evaluasi terhadap tugas administrasi, serta pemberian umpan balik oleh pimpinan. Mekanisme tersebut membantu memastikan setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan berperan dalam menjaga kualitas administrasi sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Penerapan kelima fungsi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi telah dilaksanakan secara sistematis untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Aspek lain yang mendukung efektivitas administrasi adalah pengelolaan arsip dan dokumen organisasi. Seluruh dokumen administrasi dikelola secara sistematis sehingga memudahkan proses penyimpanan, pencarian kembali, serta pemanfaatan informasi dalam pelaksanaan tugas organisasi. Pengelolaan arsip yang tertib tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga mendukung proses pengambilan keputusan melalui ketersediaan informasi yang akurat.

Dari perspektif *good governance,* hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi di Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi telah mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan koordinasi. Pengelolaan dokumen yang tertib, pembagian tugas yang jelas, serta koordinasi antarpegawai menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan tata kelola organisasi yang lebih baik. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep *good governavce* yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik (Rahmadana et al., 2020).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Serang memiliki peran strategis dalam mendukung administrasi pemerintahan melalui penataan organisasi, pengelolaan administrasi, koordinasi, pengelolaan arsip, serta pelaksanaan reformasi birokrasi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa administrasi yang dikelola secara sistematis menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas organisasi dan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pada tingkat organisasi, tetapi juga oleh pelaksanaan fungsi administrasi secara konsisten pada tingkat unit kerja.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Serang memiliki peran penting dalam mendukung administrasi pemerintahan melalui

*Corresponding author
E-mail addresses: marenyviviana@gmail.com

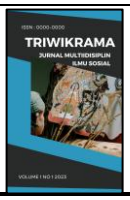

pengelolaan administrasi organisasi, penataan dokumen, pengelolaan data jabatan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi. Pelaksanaan fungsi tersebut telah mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penerapan fungsi manajemen, koordinasi antarunit kerja, serta pemanfaatan sistem informasi yang menunjang akuntabilitas organisasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh pelaksanaan administrasi yang tertib dan terkoordinasi pada tingkat unit kerja. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris mengenai pelaksanaan fungsi bagian organisasi dan Reformasi Birokrasi dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Berdasarkan hasil penelitian, Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Srang diharapkan terus meningkatkan efektivitas administrasi melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, serta peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Bagi perguruan tinggi, kerja sama dengan instansi pemerintah perlu terus ditingkatkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman yang lebih komprehensif selama program magang. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian pada perangkat daerah atau pemerintah daerah lainnya sehingga diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai implementasi administrasi pemerintahan dan reformasi birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, *21*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.

Gumay, M., Sudrajat, T., & Hartini, S. (2019). *KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI YANG BERIMPLIKASI PENATAAN JABATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA*. *3*(5).

Hasan, A. zainullah, Al-Ra'zie, Z. H., Ramdani, F. A., Lestari, N. S., Prayoga, I. A., Iskandar, I., Sarinah, S., Manarfa, M. L. O. R. A. U., Adhania, L. S. O., Hariri, A., & Gaffar Rahman, A. (2025). *ADMINISTRASI PUBLIK: TEORI, SISTEM, DAN PRAKTIK* (A. I. Sastra (ed.); 1st ed.). Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=K4VmEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA15&dq=Zakaria+Habib+Al-Ra%27Zie,+S.IP.,+M.Sos,+Ketua+&ots=uF-w_Ouynl&sig=e2A9bpxJ_bjmg4ZEK6hl3qsM6x0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Putri, T. D., Riau, U., Marnis, M., Tarigan, M. A., & Riau, U. (2024). PENGARUH PROGRAM MAGANG DAN PERSPEKTIF. *JURNAL MANAJEMEN PEMASARAN DAN PERILAKU KONSUMEN*, *03*(3), 576–589.

Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-angin, M. A., Refelino, J., Siagian, V., Nugraha, N. A., Manullang, S. O., Silalahi, M., Yendrianof, D., Sari, A. P., Supriadi, M. N., Happy, M., Sari, N., Bahri, S., Yayasan, P., & Menulis, K. (2020). *Pelayanan Publik* (J. Simarmata (ed.)). Yayasan Kita Menulis.

Rahmatan, D., Rudiana, & Adinda FA, J. (2023). PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MEMFASILITASI PROSES PERUMUSAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022. *JURNAL ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (JANITRA)*, *3*(November), 323–332.

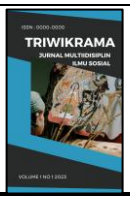

Rozikin, I. (2024). Pelatihan Penatausahaan Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Serang. *WINDRADI: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, *2*, 74–81.

Sihotang, J. S. (2023). Good Governance dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, *1*(2), 188–201.

Sri, A., Yasin, Y., Anwar, A., & Sagena, U. W. (2024). Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance. *JURNAL ILMIAH KOMPUTERISASI AKUNTANSI*, *17*(2), 410–418. https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.2142

*Corresponding author
E-mail addresses: marenyviviana@gmail.com